

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergulirnya era otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Perubahan ini berimplikasi pada kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memberdayakan serta mewujudkan kemandirian daerah, termasuk dalam hal kemandirian pengelolaan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia sebagai salah satu isu strategis otonomi daerah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah dengan sifatnya yang dimanis dan aktif. Di dalam pemerintahan, sumber daya manusia ini tercermin pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana pemerintahan. Sehingga pemberdayaan PNS juga menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengembangan PNS tidak hanya terkait dengan organisasi saja tetapi juga harus sampai kepada pengembangan sebagai individu. Pengembangan PNS erat kaitannya dengan kesempatan untuk mengaktualisasi diri melalui peningkatan kemampuan intelektual atau skill maupun kemampuan manajerial.

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah secara ideal pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan berbagai sumber daya daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan perekonomian daerah, penyebar luasan pembangunan, peningkatan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya tujuan dan hakikat otonomi daerah membawa dampak yang buruk, di mana para elit pemerintah daerah memiliki kesempatan dan peluang yang sangat luas untuk menyalah gunakan wewenang pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

Salah satu kewenangan tersebut adalah dalam hal penerimaan atau rekrutmen CPNSD, yang diduga banyak diwarnai dengan kecurangan yaitu besarnya peluang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) penerimaan CPNSD. Penerimaan CPNSD yang diselenggarakan oleh setiap daerah otonom semakin membuka peluang terjadinya kecurangan tersebut, sebab sangat terbuka kemungkinan bahwa mereka yang terseleksi menjadi CPNSD adalah yang memiliki kedekatan secara personal dengan para pejabat daerah otonom atau memiliki dukungan finansial yang besar. Demikian pula halnya dengan penerimaan CPNSD di Provinsi Lampung Tahun 2009 lalu, di mana terdapat indikasi kecurangan yang salah satu bentuknya adalah kentalnya isu primordialisme dalam penerimaan CPNSD.

Primordialisme berasal dari dua suku kata dalam Bahasa Latin yaitu *primus* yang artinya pertama dan *ordiri* yang artinya tenunan atau ikatan. Secara sosiologis dapat diartikan sebagai pandangan yang lebih mengutamakan orang-orang yang berada dalam ikatan kekeluargaan atau kekerabatan dalam segala hal. Berbagai bentuk ikatan primordialisme yang melekat dalam alam bawah sadar manusia mudah sekali dibangkitkan atau ditumbuhkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan manusia tersebut. Primordialisme merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya (Galtung Miall, 2000: 34).

Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompok, namun di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki etnosentrisme, yaitu sikap yang cenderung subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kaca mata budayanya (Galtung Miall, 2000: 36).

Primordial merupakan tertanamnya nilai-nilai, perasaan-perasaan, wawasan-wawasan yang tersosialisasikan sejak kecil merupakan syarat keutuhan personal dan psikis seseorang. Primordialisme dapat berkembang menjadi primordialisme fanatik, apabila manusia sudah tidak menganggap lagi pluralitas sebagai kesatuan bangsa, keterikatan primordial menjadi lebih dominan di dalam dirinya, berbahaya karena akan ada kecenderungan

menguasai golongan lain karena merasa dirinya (dalam konteks individu) atau golongannya (dalam konteks sosial) lebih baik dari yang lain (Galtung Miall, 2000: 38).

Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*) dan sangat susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu menguntungkan bagi dirinya. Menghilangkan rasa primordialisme dalam pelayanan publik, antara lain aparatur pemerintah harus melakukannya dengan mengedepankan rasa nasionalisme dengan konsep Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda agama, suku, budaya, tetapi tetap satu untuk membangun bangsa dan negara, juga ketika melayani kepentingan publik tidak hanya untuk kepentingan pribadi tapi harus untuk kepentingan orang banyak. Sehingga masyarakat dan pemerintah bersatu dalam kebersamaan dalam membangun sistem pelayanan publik yang handal demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan bangsa Indonesia saat ini (Galtung Miall, 2000: 40).

Primordialisme dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai adanya kecenderungan penerimaan CPNSD oleh pemerintah daerah, di mana orang-orang yang diterima adalah mereka yang memiliki keterikatan secara etnis atau kekerabatan dengan para pejabat pemerintah daerah. Fenomena ini tentunya akan berdampak pada kecemburuan dan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya. Akibat jangka panjang lainnya adalah dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang pluralis dibutuhkan demokrasi dan keadilan sosial, dengan keterbukaan di mana harapan, tuntutan, kritikan, dan penolakan masyarakat dapat terungkap dan tersalurkan sehingga terbangunlah interaksi sebagai bangsa Indonesia yang lebih komunikatif dan adil. Segala bentuk ego primordialisme dapat ditekan, dan dengan menyadari kepluralan bangsa Indonesia sebagai integrasi yang kuat dan mempunyai identitas sosial. Keterikatan sebagai satu bangsa menumbuhkan rasa nasionalisme.

Kemajemukan etnis/suku menjadi hal yang cukup menonjol pada masyarakat Provinsi Lampung khususnya, karena komposisi masyarakat pendatang serta pengaruh geografis Provinsi Lampung menjadi sangat dominan dibandingkan dengan masyarakat suku Lampung itu sendiri, sehingga dikhawatirkan para pemegang kekuasaan atau wewenang dalam konteks otonomi daerah seperti saat ini akan lebih memihak pada orang yang satu suku atau memiliki hubungan keluarga dengannya (Ardiansyah, 2009).

Sebagai contoh adanya praktik primordialisme dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Provinsi Lampung Tahun 2009 adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, di mana salah seorang peserta bernama Ganda Febriansyah yang lulus pada Formasi Tata Praja Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pada seleksi CPNSD Tahun 2008, Ganda Febriansyah pernah menjalani proses hukum karena kasus perjkorian dalam seleksi CPNSD (Sumber: *Radar Lampung* Edisi 31 Desember 2009).

Kasus lain adanya dugaan primordialisme dalam Penerimaan CPNSD terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, di mana tiga orang peserta bernama Fadho Riyansyah, Sri Lidia dan Erma Juwita yang diduga tidak mengikuti ujian penerimaan pada 29 November 2009 tetapi dinyatakan lulus pada Formasi Analisis Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Sumber: *Tribun Lampung* Edisi 9 Januari 2010).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian untuk menggambarkan praktik primordialisme dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Provinsi Lampung. Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima pada tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah tanggapan CPNSD terhadap praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD Provinsi Lampung tahun 2009?
2. Bagaimanakah pengaruh praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD terhadap profesionalisme kerja pegawai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggapan CPNSD terhadap praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD Provinsi Lampung tahun 2009.

2. Untuk mengetahui pengaruh praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD terhadap profesionalisme kerja pegawai.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan dan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian mengenai praktik primordialisme penerimaan CPNSD pada Provinsi Lampung

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi bagi pihak-pihak yang akan membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai praktik primordialisme penerimaan CPNSD. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Pemerintah Provinsi Lampung agar pada masa-masa mendatang lebih mengedepankan profesionalisme, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, sehingga tidak ada lagi primordialisme dalam penerimaan CPNSD.